



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ahmadi Miru. Andi Surya Nusantara Djabba. 2022. *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan*. Kencana: Jakarta.
- _____. Sakka Pati. 2021. *Hukum Perjanjian: Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bersama dalam KUH Perdata (BW) Edisi Revisi*. Sinar Grafindo: Jakarta.
- Andjar Pachta. *et all*, 2008. *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*. Cetakan Ke-3. Kencana dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta.
- Darwis Anatami. 2021. *Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan*. Deepublish Publisher: Yogyakarta.
- Dwi Utami Nuraini. 2017. *Badan Usaha dan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia*. Istana Media: Yogyakarta.
- Elyta Ras Ginting. 2018. *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Hadi Subhan. 2019. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Cetakan keenam. Kencana: Jakarta.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Edisi Revisi. Cetakan ke- 4. Mirra Buana Media: Yogyakarta.
- Jonaedi Efendi. Jhonny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana: Jakarta.
- Jono. 2008. *Hukum Kepailitan*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Kartika Sari. 2019. *Mengenal Koperasi*. Cempaka Putih: Klaten.
- Ketut Oka Setiawan. 2016. *Hukum Perikatan*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Mulhadi. 2018. *Hukum Perusahaan Bentuk -Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Raja Grafindo Persada: Depok.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan. 2003. *Naskah Akademik Mengenai Court Dipute Resolution*. Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI: Jakarta.
- Romli Arsyad. 2020. *Hukum dan Peran Koperasi dalam Pembangunan Ekonomi Kerakyatan*. Alqaprint Jatinangor: Bandung.
- Rudy A. Lontoh. *et.all*. *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Cetakan Pertama. Alumni: Bandung.



- Sudikno Mertokusumo. 2021. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. CV Maha Karya Pustaka: Yogyakarta.
- Susanti Adi Nugroho. 2018. *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Kencana: Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2016. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan penundaan Kewajiban pembayaran Utang*. Edisi Kedua. Kencana: Jakarta.
- Tedi Sudrajat. Endra Wijaya. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Yuhelson. 2020. *Kepastian Hukum Perdamaian Dalam Kepailitan*. Zahir Publishing: Yogyakarta
- _____. 2019. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Ideas Publishing : Gorontalo.

JURNAL:

- Acep Rohandi. 2020. *Perdamaian Dalam Kepailitan Sebagai Upaya Penyelesaian Utang Piutang Antara Debitor Dengan Para Kreditor*. Jurnal Selisik. Vol.6. No. 2.
- Annisa Justisia. Muhammad Rusli. 2019. *Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran*. Jurnal Pena Justisia. Vol. 18. No. 1.
- Freisy Maria Kukus. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kurator Dalam Perkara Kepailitan*. Jurnal Lex Privatum. Vol.III.No.2.
- Geral Timothy. et.all. 2022. *Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Dalam Perkara Kepailitan*. Jurnal Lex Privatum Universitas Sam Ratulangi. Vol. 10.No.02.
- Hilda Hilmiah. 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pasal Modal, Jurnal Cita Hukum*. Volume 1 Nomor 2. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta.
- I Dewi Ayu Maheswari Adiananda. Putu Gede Arya Munerthayasa. 2017. *Akibat Hukum Pembatalan Terhadap Akta Perdamaian (Acta Van Dading) Oleh Salah Satu Pihak Yang Berperkara di Pengadilan*. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum. Vol.06 No. 02. Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Intan Humairah. 2022. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Hakim Pengawas Dalam Kepailitan dan PKPU*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan. Vol. 6 (3). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.



- Ivan Harsono. Paramita Prananingtyas, 2019, *Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer*. Notarius. Vol. 12 No. 2. Program Studi Megister Kenotariatan. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- J.H. Sinaulun. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat*. Jurnal Ideas universitas Jayabaya. Vol. 4. No. 1. Jakarta.
- Miranda Lutfi Nasution. *et.all.* 2023. *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan No.23/UU-/XIX/2021)*. Recht Studiosum Law Review Universitas Sumatra Utara. Vol.02.No.02. Medan.
- Ni Nyoman Ratih Kemala Sandy. Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati. 2018. *Implikasi Hukum Pembubaran Koperasi Yang Diputus Pailit*, Jurnal Ilmu Hukum. Volume 6 Nomor 10. Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana. Bali.
- Ni Made Mirah Dwi Lestar. *et.all.* 2022. *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Interpretasi Hukum. Volume 3 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Denpasar. Bali.
- Serlika Aprita. Sarah Qosim. 2022. *Optimalisasi Wewenang dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jurnal Ius Constituendum. Vol.7. No.2. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Palembang.
- Udin Silalahi. Beatrix Tanjung. 2021. *Perjanjian Perdamaian Pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berulang: Kedudukan dan Implikasi*. Undang: Jurnal Hukum. Vol.4.No.2.

INTERNET:

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, KBBI VI Daring. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bangkrut>
Diakses pada 6 Januari 2024.
- Bagian Hukum SETDA Kabupaten Sukoharjo. 2024. *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya*. <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya>. Diakses pada tanggal 29 Februari 2024.
- Bernadetha Aurelia Oktavira. 2022. *2 Syarat Kepailitan dan Penjelasan*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-kepailitan-cl1266>. diakses pada 04 Februari 2024.



Maksum Rangkuti. 2023. *Perlindungan Hukum Indonesia: Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh*. <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>. Diakses pada tanggal 29 Februari 2024.

Tim Pengurus. 2024. *Proposal Perdamaian*. diakses pada website <https://timpengurus-totalindoep.com/proposal-perdamaian/>. Pada tanggal 10 Januari 2024.

Yenni Ratna Pratiwi. 2014. *Pentingnya Partisipasi Anggota Dalam Koperasi. Pentingnya Partisipasi Anggota dalam Koperasi – Koperasi Mahasiswa UGM* diakses pada tanggal 23 Juni 2024.

SKRIPSI:

Muhammad Attalariq Gio. 2023. *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Yang Telah Melaksanakan Prestasi Berdasarkan Homologasi Yang Kemudian Dibatalkan Melalui Putusan Kasasi*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Sheila Posita. 2010. *Acitio Pauliana Untuk Melindungi Budel Pailit Dari Perbuatan Debitor yang dapat merugikan Kreditor*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Burgerlijk Wetboek.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah.



Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan
Perkoperasian.



LAMPIRAN

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., CN.

Jabatan : Guru Besar

Asal Instansi : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Dengan ini merangkan bahwa:

Nama : Raga Rai

NIM : B011201180

Fakultas/ Prodi : Hukum/ Ilmu Hukum

Judul Penelitian : Permohonan Pembatalan Homologasi oleh Anggota Koperasi

Telah melakukan Penelitian dan Wawancara secara daring melalui media telekomunikasi ZOOM sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir yang bersangkutan bersama Bapak Prof. Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., CN. selaku Guru Besar Hukum Kepailitan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, pada hari Kamis, 13 Juni 2024, pukul 11.00 WITA.

Surabaya, 13 Juni 2024

Prof. Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., CN.



SURAT KETERANGAN
No : 01.B.INP-SKET.VI.2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Imran Nating, S.H., M.H.**
Pekerjaan : - *Managing Partner*, Imran Nating & Partner Law Office;
- Ketua Umum Asosiasi Kurator & Pengurus Indonesia (AKPI) Periode 2022-2025.

Dengan ini menerangkan yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : **Raga Rai**
NIM : B011201180
Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin
Judul Penelitian : Permohonan Pembatalan Homologasi oleh Anggota Koperasi

Telah melakukan Penelitian dan Wawancara secara daring melalui media telekomunikasi ZOOM sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir yang bersangkutan bersama Bapak Imran Nating, S.H., M.H. selaku praktisi dibidang Kepailitan dan PKPU, pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2024, pukul 15.00 WITA.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 Juni 2024
Imran Nating & Partners

Imran Nating, S.H., M.H.



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizal Rustam, S.H., M.H.

Jabatan : Kurator dan Pengurus

Asal Instansi : Ismak Advocaten

Dengan ini merangkan bahwa:

Nama : Raga Rai

NIM : B011201180

Fakultas/ Prodi : Hukum/ Ilmu Hukum

Judul Penelitian : Permohonan Pembatalan Homologasi oleh Anggota Koperasi

Telah melakukan Penelitian dan Wawancara secara daring melalui media telekomunikasi ZOOM sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir yang bersangkutan bersama Bapak Muhammad Rizal Rustam, S.H., M.H. selaku praktisi dibidang Kepailitan dan PKPU, pada hari Kamis, 13 Juni 2024, pukul 13.30 WITA.

Jakarta, 28 Juni 2024

Muhammad Rizal Rustam, S.H., M.H.



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Yudhi Wibisana, S.H.
Jabatan : Wakil Ketua II
Asal Instansi : Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah

Dengan ini merangkan bahwa:

Nama : Raga Rai
NIM : B011201180
Fakultas/ Prodi : Hukum/ Ilmu Hukum
Judul Penelitian : Permohonan Pembatalan Homologasi oleh Anggota Koperasi

Telah melakukan Penelitian dan Wawancara secara daring melalui media telekomunikasi ZOOM sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir yang bersangkutan bersama Bapak Yudhi Wibisana, S.H. selaku perwakilan Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah, pada hari Rabu, 19 Juni 2024, pukul 13.00 WITA.

Jakarta, 28 Juni 2024

YUDHI WIBISANA, S.H.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

JL. R.A. KARTINI No.18/23, TELEPON : 0411 – 3624058, FAX : 0411 – 3634667
WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : pn.makassar@gmail.com
MAKASSAR 90111

Makassar, 24 Juni 2024

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U1/ 57 /PB.01/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

MOEHAMMAD PANDJI SANTOSO, S.H., M.H.

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : RAGA RAI
Nim : B011201180
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : **Permohonan Pembatalan Homologasi Oleh Anggota Koperasi**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 12 Juni 2024 sampai 24 Juni 2024.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tanggal 10 Juni 2024 Nomor : 1923/UN4.5.1/PT.00/2024


WAKIL KETUA
MOEHAMMAD PANDJI SANTOSO, S.H., M.H.

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar,
- Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin



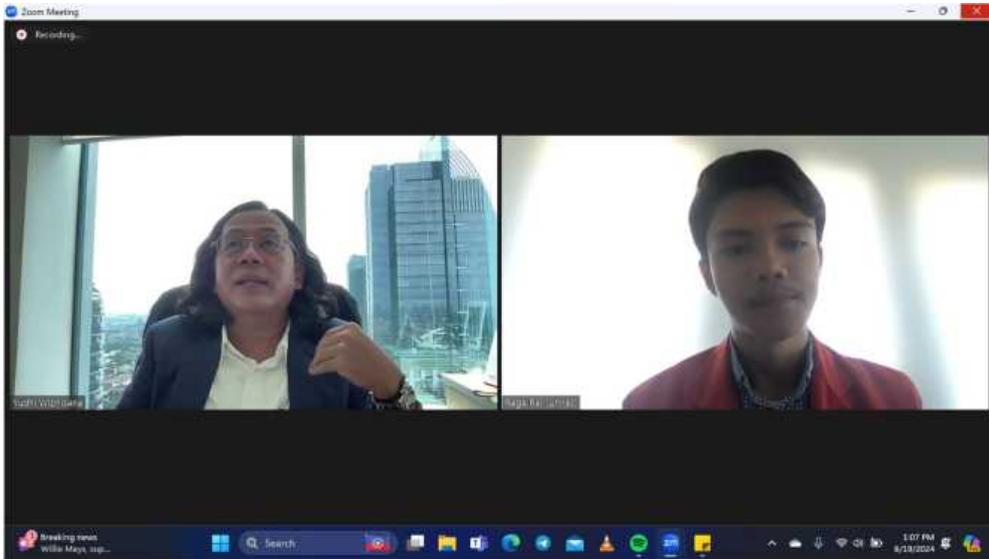
DOKUMENTASI



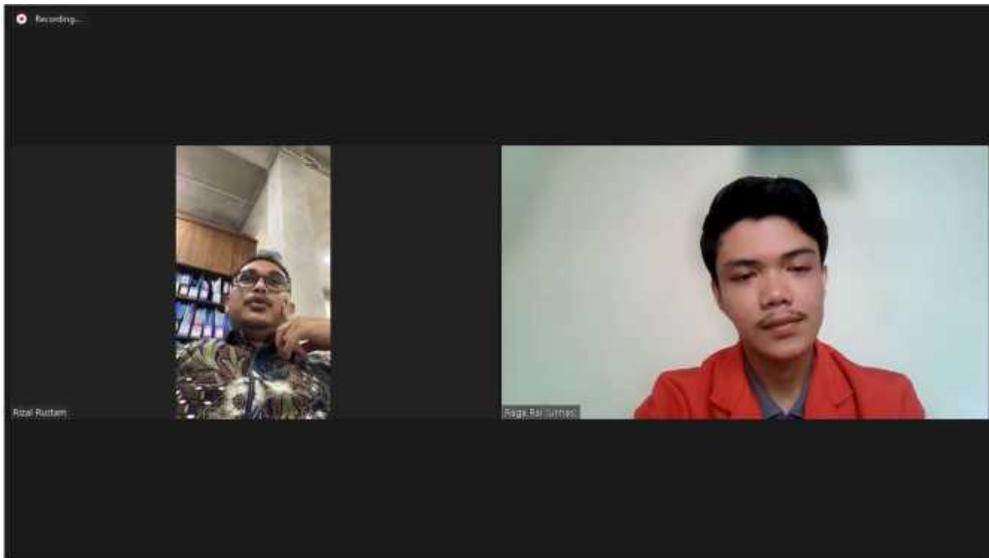
Dokumentasi wawancara penelitian dengan Bapak Pror. Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N. Guru Besar Hukum Kepailitan Universitas Airlangga



Dokumentasi wawancara penelitian dengan Bapak Imran Nating, S.H., M.H. *Managing Partner* Imran Nating & Partner Law Office dan Ketua Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) Periode 2022-2025



Dokumentasi wawancara penelitian dengan Bapak Yudhi Wibisana, S.H. Wakil Ketua II Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah



Dokumentasi wawancara penelitian dengan Bapak Muhammad Rizal Rustam, S.H., M.H. *Senior Advocate* serta Kurator dan Pengurus pada Ismak Advocaten



Dokumentasi wawancara penelitian dengan Bapak Herianto, S.H., M.H. Hakim
Pengadilan Niaga Makassar